



## BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2017 total Anggaran **Rp. 20.579.882.346,-** telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung **Rp. 9.871.712.319,-** dengan realisasi **Rp. 6.468.574.148,- (65,53%)** dan Belanja Langsung **Rp. 10.708.170.027,-** dengan realisasi **Rp. 9.192.355.088,- (85,84%)** dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 11 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 3.722.266.727,-** realisasi sebesar **Rp. 3.356.867.741,- (90,18%)**; karena beberapa kegiatan seperti biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya internet, Biaya petugas kebersihan dan taman, biaya bahan bakar, biaya petugas keamanan dan biaya perjalanan dinas tidak direalisasi semua dan ini sesuai dengan kebutuhan riil SKPD.
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 472.700.605,-** realisasi sebesar **Rp. 441.638.962,- (93,43%)**; karena pada belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional belum direalisasikan, sisa belanja servis dan selebihnya merupakan sisa belanja instalasi



- peralatan kantor dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan riil SKPD.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 113.030.030,-** realisasi sebesar **Rp. 113.013.030,- (99,98%)**.
- d. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemulangan Pegawai yang Pensiun dengan jumlah dana **Rp. 7.000.000,-** realisasi sebesar **Rp. 6.982.000,- (99,74%)**.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 195.000.000,-** realisasi sebesar **Rp. 184.800.000,- (94,76%)**; karena anggaran pelatihan singkat PNS tidak direalisasi semua dan akan dilanjutkan pada tahun 2018, dan mencari lembaga penyelenggaraan, sehingga perlu dianggarkan pada tahun 2018.
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang terdiri dari 6 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 250.000.000,-** realisasi sebesar **Rp. 196.121.740,- (78,45%)**; karena anggaran Belanja Lembur PNS untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai dan Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja, SOP dan SPM SKPD tidak direalisasikan semuanya.
- g. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 25.000.000,-** realisasi sebesar **Rp. 24.750.600,- (99,00%)**;
- h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 37 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 5.061.919.695,-** realisasi sebesar **Rp. 4.086.526.982,- (80,73%)**; karena ada 2 (dua) kegiatan yg tidak terealisasi seperti kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,



selain itu ada beberapa kegiatan, belanja uang lembur PNS tidak terealisasi karena disesuaikan kebutuhan OPD.

- i. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 24.445.500,-** realisasi sebesar **Rp. 24.370.200,- (99,69%)**;
- j. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 35.000.000,-** realisasi sebesar **Rp. 33.850.000,- (96,71%)**; karena anggaran belanja internet direalisasikan sesuai kebutuhan OPD.
- k. Program Pengelolaan Barang Daerah yang terdiri dari 8 kegiatan dengan jumlah dana **Rp. 801.807.470,-** realisasi sebesar **Rp. 723.433.833,- (90,22%)** ; karena adanya belanja perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah direalisasikan sesuai kebutuhan OPD

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Banggai yang sebelumnya merupakan Dinas PPKA telah memenuhi tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Organisasi, hal ini dapat tercermin dari pencapaian 7 (Tujuh) sasaran.

<b>N O</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>NILAI CAPAIAN (%)</b>
1	<i>Meningkatnya Kualitas Rancangan APBD/APBD-P Kabupaten Banggai (BIDANG ANGGARAN)</i>	1.534.933.865	1.113.495.717	72,54
2	<i>Meningkatnya Layanan Penatausahaan Keuangan Daerah (BIDANG PERBENDAHARAAN)</i>	964.800.000	689.439.597	71,45



3	Meningkatnya Layanan Penatausahaan Aset Daerah ( BIDANG ASET)	1.748.500.000	1.652.819.139	94,52
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan (BIDANG AKUNTANSI)	1.195.700.000	1.136.227.733	95,02
5	Meningkatnya Tata Kelola BPKAD yang Bersih dan Akuntabel (BAGIAN SEKRETARIAT)	5.264.236.162	4.600.372.902	87,38
<b>JUMLAH</b>		<b>10.708.170.027</b>	<b>9.192.355.088</b>	<b>85,84</b>

Meskipun realisasi anggaran sebesar **85,84%** dari **Rp. 9.192.355.088,-** pagu yang dianggarkan, BPKAD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Pemerintah Daerah, namun demikian ada beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan karena kegiatan tersebut dipengaruhi oleh peran serta pihak eksternal yang tidak dapat dilaksanakan sesuai skedul yang diharapkan.

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan in-efisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih



besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara *rasio* pencapaian *outcome* dengan *rasio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Pada tahun Anggaran 2016 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai melaksanakan 10 (sepuluh) Program dengan 62 (enam puluh dua) kegiatan (terlampir) dengan pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikategorikan bahwa Program Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan dengan baik/berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari berjalannya sebagian besar kegiatan baik yang menyangkut pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, Capaian untuk masing - masing kegiatan dapat diuraikan pada Tabel formulir penetapan kinerja (terlampir), dari semua kegiatan - kegiatan yang ada sesuai dengan indikator kinerja pada dasarnya sebagian besar telah dicapai sebagaimana apa yang diharapkan hal ini dapat dilihat sampai dengan posisi 31 Desember 2017. Dengan demikian dengan kondisi ini kami menganggap bahwa sasaran ini secara relatif dan secara umum dapat dicapai.

Dalam Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai memperoleh target pendapatan dan Alokasi Dana Anggaran belanja yang bersumber dari APBD antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain Daerah dan SILPA tahun 2016. Adapun Penjelasannya sebagai berikut :



**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja BPKAD Tahun 2017**

NO	URAIAN / PENDAPATAN / BELANJA/ PROGRAM/KEGIATAN	PENDAPATAN/BELANJA (Rp)			Alasan / Permasalahan
		TARGET/PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH (Termasuk PAD)</b>	<b>1.778.383.257.343,00</b>	<b>1.682.882.216.532,00</b>	<b>94,63</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>10.112.702.112,00</b>	<b>14.527.111.051,00</b>	<b>143,65</b>	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.503.840.869,00	2.503.840.869,00	100,00	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.608.861.243,00	12.023.270.182,00	158,02	
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.503.452.019.180,00</b>	<b>1.400.150.084.809,00</b>	<b>93,13</b>	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	245.953.294.180,00	163.741.269.329,00	66,57	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	866.617.294.000,00	866.617.294.000,00	100,00	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	390.881.431.000,00	369.791.521.480,00	94,60	
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>264.818.536.051,00</b>	<b>268.205.020.672,00</b>	<b>101,28</b>	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	1.437.635.905,00	1.508.349.308,00	104,92	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.448.360.146,00	45.764.131.364,00	107,81	
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	220.357.540.000,00	220.357.540.000,00	100,00	
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	575.000.000,00	575.000.000,00	100,00	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>366.104.437.794,00</b>	<b>360.565.874.265,00</b>	<b>98,49</b>	
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>366.104.437.794,00</b>	<b>360.565.874.265,00</b>	<b>98,49</b>	
<b>5.1.3.</b>	<b>BELANJA SUBSIDI</b>	<b>404.000.000,00</b>	<b>201.996.000,00</b>	<b>50,00</b>	
5.1.3.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	404.000.000,00	201.996.000,00	50,00	
5.1.3.01.02.	Belanja Subsidi kepada Lembaga	404.000.000,00	201.996.000,00	50,00	
<b>5.1.4.</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>13.226.800.000,00</b>	<b>12.235.010.000,00</b>	<b>92,50</b>	
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	12.926.800.000,00	12.235.010.000,00	94,65	
5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Lainnya	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	100,00	
5.1.4.05.03	Belanja Hibah Untuk Pengamanan	400.000.000,00	362.960.000,00	90,74	
5.1.4.05.07	Belanja Hibah Kepada KNP1	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	
5.1.4.05.08	Belanja Hibah Kepada Organisasi Pramuka	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	
5.1.4.05.09	Belanja Hibah Untuk KONI dan Kegiatan Olah Raga	3.000.000.000,00	2.732.250.000,00	91,08	
5.1.4.05.12	Belanja Hibah Kepada PMI	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	
5.1.4.05.13	Belanja Hibah Kepada Lembaga Adat dan Lembaga Keagamaan	300.000.000,00	200.000.000,00	66,67	



NO	URAIAN / PENDAPATAN / BELANJA / PROGRAM/KEGIATAN	PENDAPATAN/BELANJA (Rp)			Alasan / Permasalahan
		TARGET/PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	
5.1.4.05.14	Belanja Hibah kepada Persatuan Wredatama, Pepabri, Angkatan 45	250.000.000,00	200.000.000,00	80,00	
5.1.4.05.15	Belanja Hibah Organisasi Profesi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
5.1.4.05.23	Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah	1.748.000.000,00	1.523.000.000,00	87,13	
5.1.4.05.36	Belanja Hibah kepada BOP PAUD Swasta	3.028.800.000,00	3.016.800.000,00	99,60	
<b>5.1.4.06.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
5.1.4.06.01.	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
5.1.5	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>857.500.000,00</b>	<b>85,75</b>	
5.1.5.07.	<b>Belanja Bantuan Sosial untuk Perorangan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>857.500.000,00</b>	<b>85,75</b>	
5.1.5.07.01	Belanja Bantuan Sosial untuk Perorangan	1.000.000.000,00	857.500.000,00	85,75	
5.1.6.	<b>BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>7.137.288.600</b>	<b>7.137.288.600,00</b>	<b>100,00</b>	
5.1.6.03.	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>	<b>7.137.288.600</b>	<b>7.137.288.600,00</b>	<b>100,00</b>	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....	7.137.288.600,00	7.137.288.600,00	100,00	
5.1.7.	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>342.836.349.194,00</b>	<b>339.134.079.665,00</b>	<b>98,92</b>	
5.1.7.03.	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa</b>	<b>338.515.083.350,00</b>	<b>338.515.083.350,00</b>	<b>100,00</b>	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	118.157.543.350,00	118.157.543.350,00	100,00	
5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa dari APBN	220.357.540.000,00	220.357.540.000,00	100,00	
5.1.7.05.	<b>Belanja Bantuan Kepada Partai Politik</b>	<b>800.916.000,00</b>	<b>618.996.315,00</b>	<b>77,29</b>	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	800.916.000,00	618.996.315,00	77,29	
5.1.7.07.	<b>Belanja Bantuan Keuangan BOSDA</b>	<b>3.520.349.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.7.07.01	Belanja Bantuan Keuangan BOSDA	3.520.349.844,00	0,00	0,00	
5.1.8.	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
5.1.8.01.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	66,67	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>88,89</b>	
6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PDAM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	
6.2.4	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.871.712.319,00</b>	<b>6.225.878.352,00</b>	<b>63,07</b>	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.962.305.844,00	2.476.303.460,00	83,59	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	210.744.024,00	189.854.120,00	90,09	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	185.550.625,00	167.960.000,00	90,52	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.115.625,00	0,00	0,00	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	111.831.250,00	100.350.000,00	89,73	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	151.602.215,00	135.715.080,00	89,52	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.587.239,00	6.371.974,00	96,73	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.438,00	39.357,00	92,74	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.22	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.334.510.077,00	755.409.897,00	56,61	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.23	Jaminan Kematian	1.668.137.596,00	944.262.372,00	56,61	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.01.25	Jaminan Kesehatan	1.714.741.494,00	68.324.900,00	3,98	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.123.543.892,00	993.542.192,00	88,43	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	400.000.000,00	387.745.000,00	96,94	Disesuaikan jumlah pegawai yang ada di BPKAD
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.708.170.027,00</b>	<b>9.192.355.088,00</b>	<b>85,84</b>	
1.20.1.20.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.722.266.727,00</b>	<b>3.356.867.741,00</b>	<b>90,18</b>	
	Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	13.576.000,00	90,51	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000,00	219.738.419,00	79,90	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
	Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	50.000.000,00	49.658.536,00	99,32	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	138.682.800,00	99,06	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan	190.000.000,00	189.982.430,00	99,99	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.434.500,00	21.343.615,00	55,53	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.500.000,00	8.020.000,00	45,83	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	9.245.500,00	18,49	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	812.270.027,00	779.390.981,00	95,95	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan



## RENCANA KERJA BPKAD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

NO	URAIAN / PENDAPATAN / BELANJA / PROGRAM/KEGIATAN	PENDAPATAN/BELANJA (Rp)			Alasan / Permasalahan
		TARGET/PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	
	Keg. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	1.965.018.000,00	1.805.467.900,00	91,88	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	169.044.200,00	121.761.560,00	72,03	Dana yang direalisasikan sesuai kebutuhan
1.20 . 1.20.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>472.700.605,00</b>	<b>441.638.962,00</b>	<b>93,43</b>	
	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	319.650.605,00	303.399.700,00	94,92	Mengikuti harga yang ada di E-Catalog
	Keg. Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	24.863.000,00	99,45	Disesuaikan Harga yang ada
	Keg. Pengadaan Bangunan/Sarana Pelengkap	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00	Disesuaikan Harga yang ada
	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	Disesuaikan Harga yang ada
	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	84.700.000,00	81.383.808,00	96,08	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8.400.000,00	8.382.454,00	99,79	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.950.000,00	5.110.000,00	51,36	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	5.000.000,00	0,00	0,00	Belum adanya pemeliharaan Server
1.20 . 1.20.06.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>113.030.030,00</b>	<b>113.013.030,00</b>	<b>99,98</b>	
	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	60.000.000,00	59.983.000,00	99,97	Disesuaikan Harga yang ada
	Keg. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	53.030.030,00	53.030.030,00	100,00	Disesuaikan Harga yang ada
1.20 . 1.20.06.01 . 04	<b>Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.982.000,00</b>	<b>99,74</b>	
	Keg. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	7.000.000,00	6.982.000,00	99,74	Disesuaikan jumlah pegawai Pensiun yang ada di BPKAD
1.20 . 1.20.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>184.800.000,00</b>	<b>94,77</b>	
	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	195.000.000,00	184.800.000,00	94,77	Disesuaikan Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK
1.20 . 1.20.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>196.121.740,00</b>	<b>78,45</b>	
	Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	40.000.000,00	36.766.100,00	91,92	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	19.906.750,00	99,53	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir	50.000.000,00	41.930.860,00	83,86	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	60.000.000,00	55.472.580,00	92,45	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset pemerintah Kabupaten banggai (SKPD)	40.000.000,00	23.104.150,00	57,76	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Penetapan Kinerja, SOP dan SPM SKPD	40.000.000,00	18.941.300,00	47,35	Disesuaikan Kebutuhan
1.20 . 1.20.06.01 . 07	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi/Data</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.750.600,00</b>	<b>99,00</b>	
	Keg. Penyediaan Data dan Updating Data Informasi	25.000.000,00	24.750.600,00	99,00	Disesuaikan Kebutuhan
1.20 . 1.20.06.01 . 17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>5.061.919.695,00</b>	<b>4.086.526.982,00</b>	<b>80,73</b>	
	Keg. Penyusunan Analisa Standar Belanja	63.600.000,00	53.026.850,00	83,38	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Standar Harga Satuan	125.299.500,00	125.148.393,00	99,88	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	61.264.000,00	0,00	0,00	Kegiatannya telah dilaksanakan
	Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	365.780.000,00	318.160.660,00	86,98	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	328.150.000,00	271.327.350,00	82,68	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	75.500.000,00	0,00	0,00	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena terkendala Narasumber
	Keg. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	627.864.100,00	614.129.745,00	97,81	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penatausahaan Barang Daerah	193.528.930,00	190.107.168,00	98,23	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Standar Pelayanan Publik	20.000.000,00	1.956.250,00	9,78	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penatausahaan Keuangan SKPD	30.000.000,00	4.994.000,00	16,65	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penatausahaan Keuangan SKPKD	40.000.000,00	4.966.500,00	12,42	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Fasilitas penyediaan data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan	40.000.000,00	39.232.800,00	98,08	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Fasilitas dan Penatausahaan TPTGR	340.992.300,00	324.511.087,00	95,17	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Pengembangan dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	314.238.800,00	191.199.279,00	60,85	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Database dan Mapping Rekening Penerimaan dan Belanja Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	Kegiatannya telah dilaksanakan
	Keg. Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Subsidi, Hibah dan Bantuan	223.740.680,00	180.556.136,00	80,70	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penelitian RKA/RKPA dan DPA/SKPD	61.000.000,00	35.740.950,00	58,59	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan	158.130.000,00	144.944.886,00	91,66	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD	54.023.685,00	36.368.685,00	67,32	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	0,00	Disesuaikan Kebutuhan





NO	URAIAN / PENDAPATAN / BELANJA/ PROGRAM/KEGIATAN	PENDAPATAN/BELANJA (Rp)			Alasan / Pemasalahan
		TARGET/PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	
	Keg. Absorpsi, verifikasi dan pengentrian Data Anggaran Kas SKPDS dalam Rangka Penerbitan SPN	41.500.000,00	21.830.300,00	52,60	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penelitian/Verifikasi Kelengkapan SPM SKPD dalam Rangka Penerbitan SP2D	93.200.000,00	34.167.100,00	36,66	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Monitoring dan Pembinaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	75.000.000,00	70.942.338,00	94,59	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Laporan Arus Kas	38.500.000,00	0,00	0,00	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penatausahaan Administrasi Kas Umum	185.000.000,00	154.596.348,00	83,57	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. BinteK Penatausahaan Keuangan SKPD	161.000.000,00	156.930.000,00	97,47	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	72.255.300,00	70.458.642,00	97,51	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah Serta Penyerapan Anggaran dengan Unit Kejadian Instansi Terkait	131.500.000,00	94.839.450,00	72,12	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA	91.500.000,00	63.498.841,00	69,40	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS	113.000.000,00	61.214.220,00	54,17	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Sosialisasi Penggajian PNS	34.600.000,00	31.421.000,00	90,81	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan	225.050.000,00	198.312.622,00	88,12	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	369.586.300,00	363.599.776,00	98,38	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan	80.000.000,00	76.109.105,00	95,14	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	69.300.000,00	49.000.000,00	70,71	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Pembinaan Sistem Akuntansi SKPD	32.832.900,00	32.372.455,00	98,60	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Rekonsiliasi Realisasi APBD	74.983.200,00	70.864.046,00	94,51	Disesuaikan Kebutuhan
1.20 . 1.20.06.01 . 19	<b>Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>24.445.500,00</b>	<b>24.370.200,00</b>	<b>99,69</b>	
	Keg. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan	24.445.500,00	24.370.200,00	99,69	Disesuaikan Kebutuhan
1.20 . 1.20.06.01 . 23	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>33.850.000,00</b>	<b>96,71</b>	
	Keg. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	35.000.000,00	33.850.000,00	96,71	Disesuaikan Kebutuhan
1.20 . 1.20.06.01 . 31	<b>Program Pengelolaan Barang Daerah</b>	<b>801.807.470,00</b>	<b>723.433.833,00</b>	<b>90,23</b>	
	Keg. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah	257.868.800,00	208.126.496,00	80,71	Disesuaikan jumlah sertifikat
	Keg. Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah	216.166.370,00	189.187.700,00	87,52	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi Dan Pengelolaan Aset Daerah	106.923.600,00	105.993.095,00	99,13	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah	89.587.900,00	89.587.726,00	100,00	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Pembinaan Penyimpan/Pengurus Barang	75.817.300,00	75.620.154,00	99,74	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Pengkajian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah	12.600.000,00	12.178.538,00	96,66	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Penyusunan laporan realisasi pengadaan dan distribusi aset daerah	28.559.200,00	28.504.350,00	99,81	Disesuaikan Kebutuhan
	Keg. Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah	14.284.300,00	14.235.774,00	99,66	Disesuaikan Kebutuhan

Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan pagu dibandingkan target renja tahun 2017. Tetapi hal itu sangat mempengaruhi target Output Capaian.

Secara keseluruhan, tujuan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel diharapkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan sasaran dan output.



### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Kondisi Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( BPKAD) ditentukan oleh :

#### 1. Kondisi Lingkungan Internal

Faktor keberhasilan suatu Institusi BPKAD dapat dilihat dari kondisi lingkungan Internalnya, adapun kondisi lingkungan internal dijabarkan sebagai berikut :

##### a. *Kekuatan*

- Potensi Sumber Daya Manusia yang cukup memadai.
- Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk menjadikan Kabupaten Banggai memiliki sistim pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.
- Perlatan kerja yang cukup memadai.
- Suasana kerja yang kondusif.
- Komitmen pimpinan untuk meningkatkan sumber daya manusia ditandai dengan diberikannya pagu anggaran untuk diklat keuangan.
- Motivasi yang cukup tinggi dari semua staf.
- Dukungan masyarakat (SKPD terkait)

##### b. *Kelemahan*

- Kapasitas sumber daya aparatur belum sepenuhnya memenuhi tuntutan sistim pengelolaan keuangan daerah

#### 2. Kondisi Lingkungan Eksternal

##### a. *Peluang*

- Memenuhi sumber daya aparatur yang memenuhi syarat untuk menerapkan sistim pengelolaan keuangan daerah.
- Tersedianya jaringan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- Adanya Komitmen Bupati terhadap pengembangan sistim pengelolaan keuangan daerah



b. *Ancaman*

- Rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- Pemberlakuan sistem komputerisasi pengelolaan keuangan daerah secara nasional akan menyebabkan sanksi bila tidak ditaati.
- Terbatasnya dana Pemerintah Kabupaten Banggai (APBD)

Penduduk merupakan modal potensial bagi pembangunan dan sangat menguntungkan jika dibandingkan dengan peningkatan kualitas [mutu modal manusia jumlah penduduk yang banyak jika tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai maka akan dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang pengeluaran perkapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi standar hidup minimum.

Terdapat beberapa isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;

1) Keterbatasan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan permasalahan yang harus diatasi sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dasar ; UU NO 11 TAHUN 2009 PASAL 24, penyelenggaraan kesos menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.;

2) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi dalam pembangunan , sehingga masih terasa kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antar daerah; .

3) Kurang optimalnya peran dinas sosial provinsi,kabupaten dan kota di dalam menyusun rencana program dan anggaran.;

4) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar-pemerintah pusat ,provinsi dan kabupaten\kota.hal ini di cerminkan dengan pola penanganan kesejahteraan sosial di kabupate\kota sangat beragam kelembagaan pemerintah yang menanganinya, sehingga fungsi koordinasi



dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan sosial di kabupaten\kota relative sangat kecil. Kondisi ini melahirkan kesenjangan antara kapasitas penanganan dengan jumlah populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di tangani. Perbedaan nomenkatur struktur organisasi yang menangani permasalahan sosial di daerah kabupaten\kota ,dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.

5) Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial merupakan gangguan yang serius terhadap berfungsinya suatu masyarakat yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa [manusia], harta benda dan lingkungannya. Masyarakat yang tertimpa bencana pada umumnya memerlukan bantuan dari luar [masyarakat,pemerintah,organisasi kemanusiaan], atas dasar tersebut maka pemerintah [pusat,profinsi,kabupaten\kota] memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani masyarakat yang tertimpa bencana.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD**

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah [RKPD] kabupaten banggai tahun 2018. Berdasarkan usulan yang disampaikan dan telah melalui pembahasan dalam forum OPD, seluruh usulan program dan kegiatan serta pagu indikatif telah terakomodir dalam rencana awal RKPD. Untuk tahun 2019, pagu indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai sebesar RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah) terdiri atas 11 [ sebelas ] program dan 76 [ tujuh puluh enam ] kegiatan sumber dana APBD.